

ABSTRAK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 maka pajak daerah dilimpahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola salah satunya adalah pajak bumi dan bangunan. Adapun permasalahan yang terjadi pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi di mana terjadi peningkatan jumlah piutang pajak bumi dan bangunan selama tahun 2013 – 2017. Masing-masing mengalami kenaikan sebesar Rp 8.493.807.737; Rp 11.394.897.947; Rp 10.050.607.574 dan Rp 10.831.976.515 setiap tahunnya dan jika dipersentasekan sebesar 7,9%; 9,8%; 7,9% dan 7,8%.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan piutang pajak bumi dan bangunan di Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi sehingga dapat meminimalisir jumlah piutang pada tahun berikutnya.

Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, di mana peneliti berusaha memberikan gambaran dan penjelasan yang tepat mengenai masalah yang dihadapi. Data yang diambil berdasarkan data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan teknik wawancara, observasi, studi pustaka dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknik analisis data penulis melakukan reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan piutang pajak bumi dan bangunan di Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi, meliputi perencanaan yang matang melalui penetapan target dan strategi yang dilakukan sudah baik. Sedangkan sosialisasi yang dilakukan belum sepenuhnya tepat sasaran. Pelaksanaan yang efisien, efektif dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan belum dilakukan sepenuhnya karena ketidakakuratan data di data base dengan data di lapangan seperti masih banyaknya data sampah, SPPT ganda, tanah guntai dan wajib pajak yang tidak jelas masih terhitung tinggi. Selain itu, sumber daya manusia yang tidak memadai, partisipasi dari masyarakat yang kurang, kerjasama dengan pihak kantor perizinan, penegak hukum, kelurahan, RT maupun RW belum dilaksanakan dengan optimal. Pengawasan yang ketat pada piutang pajak bumi dan bangunan pun belum dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: Analisis Pengelolaan, Piutang, Pajak Bumi dan Bangunan.